

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. DASAR HUKUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Mukomuko

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

Visi Pengadilan Agama Mukomuko adalah “**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO YANG AGUNG**”. Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Mukomuko siap bersama-sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan. Misi Pengadilan Agama Mukomuko adalah:

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Peradilan Agama yang Modern
3. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Mukomuko melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelesaian mediasi bagi para pihak berperkara.
2. Terwujudnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kualitas putusan Pengadilan Agama Mukomuko.
3. Terwujudnya pelayanan prima yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
4. Terwujudnya tertib administrasi perkara berdasarkan pola bindalmin sesuai dengan KMA No. 01/SK/II/1991.
5. Terwujudnya peningkatan kualitas profesional aparat Pengadilan Agama.
6. Terwujudnya Aparat peradilan yang baik.
7. Terwujudnya kemudahan akses produk peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
8. Terwujudnya penyelenggara-an administrasi umum kesekretariatan pada Pengadilan Agama Mukomuko sesuai manajemen perkantoran yang modern.
9. Terwujudnya sarana dan prasarana untuk kelancaran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan UAKPA Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul GLP SAKTI dan Modul Aset dan Persediaan SAKTI. Modul GLP SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset & Persediaan SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Mukomuko menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Mukomuko dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan UAKPA Semester II Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Mukomuko. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Mukomuko adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan

- b) piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|--|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/Jembatan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|-----------------------------|------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jembatan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Aset Tetap Lainnya | 4 tahun |

*Piutang
Jangka
Panjang*

a. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

b. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tak Berwujud | Masa Manfaat (tahun) |
|---|----------------------|
| Software Komputer. | 4 |
| Franchise. | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram. | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I | 70 |

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2022

A.6. Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2022

Pengadilan Agama Mukomuko dalam rangka pelaksanaan program penanganan pandemic COVID-19 telah menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem WFO dan WFH di Pengadilan Agama Mukomuko;
2. Atasan langsung senantiasa memantau pegawai yang melaksanakan WFH;
3. Melakukan Penyemprotan disinfektan di lingkungan kantor secara rutin;
4. Menyediakan suplemen untuk menjaga imun tubuh bagi Pegawai;
5. Pemberlakuan PCR/Antigen bagi pegawai yang baru saja kembali dari perjalanan dinas;
6. Menerapkan *scan digital code (QR Code)* yang terintegrasi dengan *platform Peduli Lindungi*;
7. Telah melaksanakan Vaksinasi sampai dengan tahap III (*booster*);
8. Selalu mematuhi protoko kesehatan; dan
9. Melaporkan secara berjenjang apabila ada pegawai yang terindikasi positif COVID-19.

| Satker/Kode Satker | Pagu Anggaran | | Realisasi Anggaran | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
| | Belanja Barang/Jasa | Total Pagu | Belanja Barang /Jasa | Total Realisasi |
| Pengadilan Agama /401939 | Rp.3.500.000 Rp. 13.600.000 | Rp.17.100.000 | Rp.3.500.000 Rp. 13.598.095 | Rp.17.098.095 |

Seluruh anggaran telah direalisasikan seluruhnya dengan pembelian berupa:

1. Pengadaan Barang Berupa Masker;
2. Pembelian Suplemen;
3. Penyemprotan disinfektan;
4. Pembelian alat rapid tes/Tes PCR mandiri untuk seluruh pegawai Pengadilan Agama Mukomuko.

Realisasi
Pendapatan
Rp.46,-

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.46 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan Pengadilan Agama Mukomuko adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 31-Dec-22 | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Penerimaan Perpajakan | 0 | 0 | - |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 46 | 0 | 0.00 |
| Penerimaan Hibah | 0 | 0 | - |
| | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 46 | 0 | 0.00 |

Terdapat Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp. 46 dikarenakan itu adalah penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember TA 2022 dan 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | Naik/ (Turun) % |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Penerimaan Perpajakan | 0 | 0 | - |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 46 | 0 | - |
| Penerimaan Hibah | 0 | 0 | - |
| | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 46 | 0 | - |

Realisasi
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Rp 46,-

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.46 yang berasal dari penerimaan belanja pegawai tahun anggaran yang lalu .

Realisasi
Belanja Negara
Rp
8.296.232.411

B.2 Belanja

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 8,296,232,411 atau 78.90 % dari anggaran belanja sebesar Rp 10,514,356,000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022

| Uraian | 2022 | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % |
| Belanja Pegawai | 2,027,018,000 | 2,014,411,698 | 99.38 |
| Belanja Barang | 824,714,000 | 818,056,473 | 99.19 |
| Belanja Modal | 7,662,624,000 | 5,463,764,240 | 71.30 |
| Jumlah | 10,514,356,000 | 8,296,232,411 | 78.90 |

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021, Realisasi Belanja Sampai dengan 31 Desember 2022 secara total per jenis belanja mengalami kenaikan sebesar 232.78 %. Kenaikan tersebut dikarenakan pada tahun 2022 terdapat penambahan anggaran belanja modal berupa Pembangunan Gedung yang pada tahun 2021 belum ada.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2022 dan 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 | Naik/ (Turun) % |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Belanja Pegawai | 2,014,411,698 | 1,661,082,456 | 21.27 |
| Belanja Barang | 818,056,473 | 719,417,453 | 13.71 |
| Belanja Modal | 5,463,764,240 | 112,535,227 | 4755.16 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 8,296,232,411 | 2,493,035,136 | 232.78 |

Belanja
Pegawai
Rp
2.014.411.698

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.2.014.411.698 dan Rp.1.661.082.456 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

- 2) Adanya revisi penambahan anggaran belanja pemeliharaan yaitu pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan dan mesin;
- 3) Adanya kenaikan gaji PPNPN pada belanja operasional.

Belanja Modal
Rp

5.463.764.240

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Sampai dengan 30 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.463.764.240 dan Rp.112.535.227. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 10,000,000 | 112,535,227 | (91.11) |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5,453,764,240 | 0 | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 5,463,764,240 | 112,535,227 | 4755.16 |
| Pengembalian Belanja | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 5,463,764,240 | 112,535,227 | 4755.16 |

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan 4.755%, dikarenakan terdapat belanja Modal Pembangunan Gedung.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LRA

Tidak ada

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 30-Sep-21 |
|---|-----------|-----------|
| Uang Tunai di Brankas | 0 | 0 |
| Uang di Rekening Bank | 0 | 0 |
| Kuitansi yang belum di-GU-kan | 0 | 0 |
| Pembulatan karena tidak tersedia pecahan uang kecil | 0 | 0 |
| TUP | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Uang Muka Belanja
(prepayment)
Rp0,-

C.3 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Uang Muka Belanja

per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021

| Uraian | 30-Sep-22 | 30-Sep-21 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Uang Muka Belanja | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Persediaan
Rp.1.076.000

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.728.500 dan Rp. 7.119.500.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Barang Konsumsi | 4,728,500 | 7,119,500 |
| Barang untuk Pemeliharaan | 0 | 0 |
| Jumlah | 4,728,500 | 7,119,500 |

Tanah
Rp. 65.155.040

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Mukomuko per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 65.155.040 dan Rp.65.155.040. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|-------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Jan 2022 | 65,155,040 |
| Mutasi tambah: | |
| Revaluasi | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| Saldo per 31 Des 2022 | 65,155,040 |

Peralatan dan
Mesin
Rp.1.371.847.167

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.1.371.847.167 dan Rp.1.046.552.417

| | |
|---|----------------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 | 0 |
| Mutasi tambah: | 1,371,847,167 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Saldo Akhir | 1,371,847,167 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | -805,453,736 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | 566,393,431 |

Gedung dan
Bangunan
Rp.0

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0.

| | |
|---|----------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 | 0 |
| Mutasi tambah: | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Revaluasi Aset | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | 0 |

Jalan, Irigasi dan
Jembatan Rp.0

C.8 Jalan, Irigasi dan Jembatan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jembatan per 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

| | |
|---|----------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 | 0 |
| Mutasi tambah: | |
| Pembangunan Irigasi | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| Revaluasi Aset | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 0 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | 0 |

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(805.453.736)

C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp.(805.453.736) dan Rp.(563.783.455). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan KDP. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|----|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 1,371,847,167 | 805,453,736 | 566,393,431 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 1,371,847,167 | 805,453,736 | 566,393,431 |

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp. 5.453.764.240

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan merupakan aset tetap yang nilainya akan menjadi saldo Gedung dan bangunan Ketika selesai dikerjakan. Nilai Konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 5.453.764.240.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 5,453,764,240 | 0 |
| Jumlah | 5,453,764,240 | 0 |

Aset Lainnya
Rp.357.209

C.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya (Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 357.209 dan Rp. 357.209. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022 | 357,209 |
| Mutasi tambah: | 0 |
| Mutasi kurang: | 0 |
| Saldo per 31 Desember 2022 | 357,209 |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022 | 0 |
| Nilai Buku per 31 Desember 2022 | 357,209 |

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp. 4.166.941

C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.166.941 dan Rp. 9.551.230. Utang pihak ketiga pada tahun anggaran 2022 adalah beban belanja tahun 2022 yang masih harus dibayar pada tahun 2023. Yaitu beban langganan speedy bulan desember 2022 sebesar Rp. 727.497 dan beban langganan listrik desember 2022 sebesar Rp. 3.439.450

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|---------------------------|------------------|-----------|
| Utang Kepada Pihak Ketiga | 4,166,941 | 0 |
| Jumlah | 4,166,941 | 0 |

Utang Yang Belum Ditagihkan
Rp0,-

C.13 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar karena telah diterima tagihannya.

Rincian Utang yang Belum Ditagihkan

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Utang yang Belum Ditagihkan | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Uang Muka dari
KPPN
Rp.0

C.14 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 31-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|---------------------|-----------|-----------|
| Uang Muka dari KPPN | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 |

Ekuitas
Rp.6.086.231.479

C.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6.086.231.479 dan Rp.545.849.481. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Rincian Ekuitas

per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

| Uraian | 30-Dec-22 | 31-Dec-21 |
|---------------|----------------------|--------------------|
| Ekuitas | 6,086,231,479 | 545,849,481 |
| Jumlah | 6,086,231,479 | 545,849,481 |

Catatan Penting Lainnya untuk Pos Neraca

Tidak ada

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Jumlah Pendapatan PNBP Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Pendapatan PNBP tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan PNBP Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|-------------------------|----------|----------|--------------------|
| Pendapatan PNBP Lainnya | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 0 | 0 | - |

PNBP tergantung pada banyak atau sedikitnya masyarakat yang mendaftar perkara Pada Pengadilan Agama Mukomuko.

Beban Pegawai
Rp.2.008.645.889

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.2.008.645.889 dan Rp.1.666.848.259. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Belanja Gaji Pokok PNS | 856,954,500 | 669,748,420 | 27.95 |
| Belanja Pembulatan Gaji PNS | 15,537 | 13,061 | 18.96 |
| Belanja Tunj. Suami/Istri PNS | 51,271,322 | 37,252,560 | 37.63 |
| Belanja Tunj. Anak PNS | 17,705,170 | 11,618,988 | 52.38 |
| Belanja Tunj. Struktural PNS | 21,280,000 | 20,790,000 | 2.36 |
| Belanja Tunj. Fungsional PNS | 753,280,000 | 682,740,000 | 10.33 |
| Belanja Tunj. PPh PNS | 74,426,700 | 71,596,556 | 3.95 |
| Belanja Tunj. Beras PNS | 52,359,660 | 36,499,680 | 43.45 |
| Belanja Uang Makan PNS | 162,908,000 | 127,709,000 | 27.56 |
| Belanja Tunjangan Umum PNS | 18,445,000 | 8,880,000 | 107.71 |
| Jumlah | 2,008,645,889 | 1,666,848,265 | 20.51 |

Beban Persediaan
Rp. 32.388.500

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.32.388.500 dan Rp. 44.197.250. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Beban Persediaan Konsumsi | 32,388,500 | 44,197,260 | (26.72) |
| Jumlah | 32,388,500 | 44,197,260 | (26.72) |

Beban Barang dan
Jasa
Rp. 565.449.165

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 565.449.165 dan Rp.473.148.305. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perbandingan Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Beban Keperluan Perkantoran | 378,601,260 | 300,227,236 | 26.10 |
| Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 2,400,000 | 2,395,500 | 0.19 |
| Beban Honor Operasional Satuan Kerja | 34,200,000 | 36,960,000 | (7.47) |
| Beban Barang Operasional Lainnya | 49,563,608 | 60,026,415 | (17.43) |
| Beban Barang Non Operasional Lainnya | | 2,547,469 | |
| Beban Langganan Listrik | 39,867,802 | 26,331,685 | 51.41 |
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | 3,498,095 | 6,050,000 | (42.18) |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | 13,600,000 | 0 | - |
| Beban Sewa | 43,718,400 | 38,610,000 | 13.23 |
| Jumlah | 565,449,165 | 473,148,305 | 19.51 |

Beban barang dan jasa tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 19.51 persen dari beban barang dan jasa di tahun 2021. Hal tersebut karena adanya penambahan anggaran belanja jasa penanganan pandemic Covid-19 pada tahun 2022 serta ada penambahan gaji PPNPN pada tahun 2022.

Beban Pemeliharaan
Rp.173.436.328

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.173.436.328 dan Rp.143.147.075. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 79,999,269 | 77,997,600 | 2.57 |
| Beban bahan untuk pemeliharaan | 0 | 150,000 | (100.00) |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 93,437,059 | 64,999,475 | 43.75 |
| Jumlah | 173,436,328 | 143,147,075 | 21.16 |

Beban Perjalanan Dinas
Rp.49.555.000

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.49.555.000 dan Rp.59.300.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Beban Perjalanan Biasa | 49,555,000 | 59,300,000 | -16.43 |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 0 | 0 | - |
| Jumlah | 49,555,000 | 59,300,000 | -16.43 |

Terdapat penurunan pada tahun 2022 sebesar 16.43% dikarenakan pada tahun 2022 ada beberapa kegiatan koordinasi ke tingkat banding atau korwil yang di tiadakan.

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.241.670.281

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.241.670.281 dan Rp.203.880.599. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 | Naik/ (Turun) % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0 | 0 | - |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 241,670,281 | 203,880,599 | 18.54 |
| Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan | 0 | 0 | - |
| Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional | 0 | 0 | - |
| Beban Penyusutan Irigasi | 0 | 0 | - |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | 241,670,281 | 203,880,599 | 18.54 |

Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

| Uraian | 2022 | 2021 |
|---|-------------|----------|
| Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 46 | 0 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | (46) | 0 |

Ada surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.46 yang berasal dari penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

Pos Luar Biasa
Rp0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Pos Luar Biasa Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Surplus/(Defisit) LO
Rp-3.071.145.117

D.10 Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp-3.071.145.117 dan Rp.-2.590.521.498.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LO

Tidak Ada

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.545.849.481

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.545.849.481 dan Rp.642.978.634.

Surplus/(Defisit) LO
Rp-3.071.145.117

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp-3.071.145.117 dan Rp.-2.590.521.498. Surplus/(Defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp.0

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas per 30 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Rincian Koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0.

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.8.611.527.115

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.8.611.527.115 dan Rp.2.493.392.345 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas Sampai dengan 30 Desember 2022

| Uraian | 2022 |
|----------------------------|----------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 8,296,232,411 |
| Diterima dari Entitas Lain | (46) |
| Transfer Keluar | 0 |
| Transfer Masuk | 315,294,750 |
| Jumlah | 8,611,527,115 |

Pada transfer masuk tahun 2022 ada barang yang tidak tercatat dalam neraca atau BMN non neraca dikarenakan termasuk barang ekstrakomptabel yaitu microphone senilai Rp. 3.846.150, sehingga nilai transfer masuk seharusnya Rp. 319.140.900.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.46 sedangkan DKEL sebesar Rp.8.296.232.411.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar digunakan untuk mencatat saldo-saldo transfer antar entitas yang diakibatkan penerimaan aset. Untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, nilai transfer masuk sebesar Rp.315.294.750 dan Transfer Keluar sebesar Rp0. Transfer masuk merupakan penerimaan Alat Pengolah Data dari Mahkamah Agung RI.

Rincian Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2022

| Uraian | 2022 |
|---|--------------------|
| Alat pengolah data perlengkapan sidang online | 209,350,900 |
| Laptop | 89,940,000 |
| Scanner | 19,850,000 |
| | |
| Jumlah | 319,140,900 |

Pada transfer masuk tahun 2022 ada barang yang tidak tercatat dalam neraca atau BMN non neraca dikarenakan termasuk barang ekstrakomptabel yaitu microphone senilai Rp. 3.846.150, sehingga terdapat perbedaan jumlah nilai transfer masuk yang ada di LPE dan di Laporan Barang Pengguna.

*Kenaikan/ Penurunan
Ekuitas
Rp.5.540.381.998*

E.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.5.540.381.998 dan Rp.(97.129.153).

*Ekuitas Akhir
Rp.6.086.231.479*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.6.086.231.479 dan Rp.545.849.481.

Catatan Penting Lainnya untuk Pos LPE

Tidak Ada

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Pengungkapan Lain-lain

F.1 Pengungkapan Lain-lain

1. Informasi Rekening Satker

Saldo rekening satker pada 31 Desember 2022 adalah Rp.7.678.000 untuk seluruh rekening yang dimiliki. Adapun rincian informasi rekening satker tersebut adalah sebagai berikut:

| No | No Rekening | Nama Rekening | Saldo Per 31 Desember 2022 |
|----|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1 | 65324401939100 | BPG 181 PENGADILAN AGAMA 401939 | 0 |

Saldo akhir per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 untuk rekening pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Agama Mukomuko.

2. Uang Tunai di Brankas

Uang Tunai di brankas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0.

3. Revisi DIPA

-Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Mukomuko telah melakukan revisi administrasi berupa perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan pemutakhiran data hasil petunjuk operasional kegiatan (POK). Hal tersebut dirasa perlu dilakukan untuk meminimalisir deviasi halaman III DIPA serta untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja pada Pengadilan Agama Mukomuko

5. Jurnal Manual dan Reklas

-Pada Tahun 2022 telah dilakukan jurnal penyesuaian atas kesalahan pendetailan barang persediaan konsumsi, dimana Materai terinput kedalam Materai, pita cukai dan leges. Sehingga pada semester I muncul beban yang harus diserahkan kepada masyarakat, dan pada bulan juli sudah dilakukan Reklas terhadap sisa materai yang masih belum terpakai. Sehingga pada bulan Desember anomaly tersebut sudah tidak muncul lagi.

F.2 Kejadian-kejadian Setelah Tanggal Neraca

Kejadian-kejadian
Setelah Tanggal
Neraca

-Telah dilakukan revisi administrasi berupa revisi halaman III DIPA dan pemutakhiran petunjuk operasional kegiatan pada tahun 2022.

LAMPIRAN DAN DAFTAR

1. LRA Periode yang berakhir 31 Desember 2022
2. Neraca per 31 Desember 2022
3. Laporan Operasional Periode sampai dengan 31 Desember 2022
4. Laporan Perubahan Ekuitas Periode sampai dengan 31 Desember 2022
5. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2022
6. Laporan Realisasi Anggaran Belanja per 31 Desember 2022
7. Neraca Percobaan AkruaI periode 31 Desember 2022
8. Neraca Percobaan Kas Periode 31 Desember 2022
9. Neraca Percobaan AkruaI periode 31 Desember 2021
10. Neraca Percobaan Kas Periode 31 Desember 2021
11. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2022
12. Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2022
13. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan UAKPA Semester II 2022
14. Lain-Lain